

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Wisnu Baroto**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM**
3. NHK : **15876**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 296 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
4. Tanah Seluas 462 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.450.000.000

1. MOBIL, FORTUNER TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, ALPHARD MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 164.300.957

F. HARTA LAINNYA

Rp. 200.000.000

Sub Total

Rp. 5.039.300.957

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.039.300.957



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.